



Efisiensi Penggunaan Anggaran Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Ahmad Wahyudi Zein ^{1*}, Muhammad Riski ², Allya Zahra Putri Nasution ³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id^{1*}, riskiaquarius123@gmail.com², allyazahraputri53@gmail.com³

Abstract : *This study uses a qualitative method to examine the efficiency of public budget utilization in improving social welfare. The focus of this research is on how budget management policies are directed toward meeting basic community needs and promoting equitable social justice. In many cases, inefficiencies arise due to poorly targeted planning, overlapping programs, and the lack of proper evaluation of activities funded by national or regional budgets. This study reviews relevant literature and public policy regulations, analyzing policy data in the context of budget efficiency. The findings indicate that social welfare can be significantly enhanced when budget allocations are directed toward priority programs supported by consistent evaluation mechanisms. A synergistic effort between policymakers and program implementers is essential to ensure that public spending effectively achieves social development goals. This research also highlights the importance of a result-based approach in fiscal management to ensure that every dollar spent delivers tangible benefits to society.*

Keywords: *budget efficiency, fiscal management, public policy, social development, social welfare.*

Abstrak : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menelaah efisiensi penggunaan anggaran publik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Fokus kajian ini adalah pada bagaimana kebijakan pengelolaan anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menciptakan keadilan sosial secara merata. Dalam banyak kasus, ketidakefisienan penggunaan anggaran disebabkan oleh perencanaan yang tidak tepat sasaran, tumpang tindih program, serta minimnya evaluasi terhadap hasil kegiatan yang didanai oleh APBN atau APBD. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur dan regulasi terkait, serta menganalisis data kebijakan publik dalam konteks efisiensi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan secara signifikan apabila pengelolaan anggaran diarahkan pada program-program prioritas dengan mekanisme evaluasi yang konsisten. Diperlukan upaya sinergis antara perumus kebijakan dan pelaksana program agar penggunaan anggaran publik dapat mencapai tujuan pembangunan sosial. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis hasil (result-based approach) dalam pengelolaan fiskal agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Kata kunci: efisiensi anggaran, kebijakan publik, kesejahteraan sosial, pembangunan sosial, pengelolaan fiskal.

1. PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan hasil pembangunan. Dalam konteks ini, peran anggaran publik sangat krusial sebagai instrumen utama negara dalam mendanai berbagai program yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Efisiensi penggunaan anggaran publik menjadi sorotan penting karena terbatasnya sumber daya fiskal menuntut pemerintah untuk menyalurkan dana publik secara tepat guna dan tepat sasaran. Ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran tidak hanya menyebabkan pemborosan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, kajian mengenai efisiensi

anggaran publik sangat relevan untuk memastikan bahwa dana yang dibelanjakan negara mampu memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Putra & Sari, 2020).

Efisiensi anggaran publik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan yang baik dan terintegrasi. Ketika proses-proses tersebut dilakukan secara profesional dan akuntabel, maka hasil pembangunan dapat lebih terasa oleh masyarakat luas. Namun dalam praktiknya, berbagai kendala seperti tumpang tindih program, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta tidak adanya evaluasi berbasis kinerja sering kali menyebabkan output program jauh dari target. Penekanan terhadap pendekatan berbasis hasil (*result-based budgeting*) menjadi penting dalam sistem anggaran modern agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dievaluasi berdasarkan manfaat dan dampaknya. Perubahan paradigma ini membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten, kapasitas kelembagaan yang kuat, serta komitmen dari seluruh aktor birokrasi. Oleh karena itu, efisiensi anggaran bukan hanya masalah teknis administrasi, tetapi juga menyangkut etika pengelolaan publik dan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial pemerintah (Yuliani & Hidayat, 2021).

Dalam lingkup pemerintahan daerah, penggunaan anggaran publik yang efisien menjadi tantangan tersendiri, mengingat adanya ketimpangan kapasitas fiskal, perbedaan prioritas pembangunan, serta masih minimnya inovasi kebijakan berbasis data. Pemerintah daerah memiliki otonomi dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, namun dalam banyak kasus, anggaran tidak diarahkan pada program-program strategis yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengeluaran rutin yang tinggi sering kali menggerus porsi belanja publik untuk sektor sosial. Oleh karena itu, efisiensi anggaran di daerah memerlukan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti agar pengambilan keputusan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dapat menjadi langkah awal dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien (Rahmawati & Lestari, 2022).

Kesejahteraan sosial sebagai hasil dari penggunaan anggaran publik yang efisien tidak hanya diukur dari angka-angka makro, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan langsung manfaat program yang disediakan oleh negara. Misalnya, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan setara. Dalam hal ini, efisiensi tidak hanya berarti penghematan anggaran, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan anggaran yang

ada. Oleh karena itu, evaluasi kinerja program harus memperhatikan aspek kebermanfaatan, dampak sosial, dan keberlanjutan. Tanpa pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kebutuhan riil, penggunaan anggaran publik berisiko menjadi formalitas semata tanpa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Santoso & Dewi, 2021).

Berbagai studi menunjukkan bahwa negara yang mampu mengelola anggaran publik secara efisien cenderung memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi dan tingkat ketimpangan sosial yang lebih rendah. Hal ini menegaskan bahwa efisiensi bukan hanya soal teknis anggaran, melainkan juga instrumen keadilan sosial yang mampu mengurangi kesenjangan dan memperkuat kohesi sosial. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada dampak riilnya bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, reformasi kebijakan anggaran perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbasis indikator hasil. Selain itu, peran lembaga pengawas, akademisi, dan masyarakat sipil perlu diperkuat agar terjadi kontrol publik yang efektif. Dengan demikian, efisiensi penggunaan anggaran publik akan menjadi pilar penting dalam pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan (Handayani & Maulana, 2023).

2. TINJAUAN TEORITIS

Efisiensi anggaran publik juga berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. Dalam banyak kasus, alokasi anggaran lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek daripada kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, program-program yang sebenarnya kurang relevan tetap mendapatkan pendanaan, sementara program strategis untuk peningkatan kesejahteraan justru tidak berjalan optimal. Kebijakan fiskal yang responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang mendalam dan penggunaan data yang akurat. Selain itu, sistem penganggaran juga perlu bersifat fleksibel namun tetap disiplin, agar dapat menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan yang muncul di lapangan. Tanpa perencanaan dan pengendalian anggaran yang baik, maka efisiensi tidak akan tercapai dan kesejahteraan sosial sulit untuk ditingkatkan secara merata. Oleh karena itu, kebijakan anggaran tidak boleh hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan harus menjadi instrumen perubahan sosial yang nyata dan terukur (Fadilah & Utami, 2020).

Pentingnya efisiensi anggaran publik juga berkaitan dengan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi, akuntabilitas kinerja, serta partisipasi publik merupakan prinsip-prinsip yang harus melekat dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Dalam konteks kesejahteraan sosial, *good governance* menjamin bahwa

anggaran benar-benar dialokasikan dan digunakan untuk program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan transparan dalam pelaporan keuangan akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan lembaga pengawas. Hal ini berdampak positif pada efektivitas pelaksanaan program sosial yang dibiayai oleh anggaran negara. Untuk itu, pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan anggaran, sangat penting dalam mendorong efisiensi. Ketika anggaran dikelola dengan transparan dan akuntabel, potensi penyelewengan bisa ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat (Saputra & Wahyuni, 2021).

Dalam era desentralisasi fiskal seperti sekarang, peran pemerintah daerah menjadi sangat vital dalam mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya fiskalnya, tetapi tanggung jawab tersebut harus dijalankan dengan pendekatan yang cermat dan strategis. Pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien akan memperbesar risiko ketimpangan antarwilayah, karena daerah yang memiliki kelemahan dalam manajemen anggaran cenderung gagal dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah menjadi salah satu kunci penting untuk menciptakan efisiensi anggaran. Selain itu, kolaborasi antardaerah serta penerapan prinsip-prinsip keadilan fiskal juga dibutuhkan untuk menghindari terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang semakin melebar (Nuraini & Prasetyo, 2022).

Efisiensi anggaran publik tidak dapat dipisahkan dari sistem pengawasan dan evaluasi yang berbasis kinerja. Evaluasi yang hanya bersifat administratif, seperti pencapaian output fisik atau serapan anggaran, tidak lagi memadai untuk mengukur efektivitas anggaran. Evaluasi harus bergeser ke arah penilaian terhadap outcome dan impact dari program-program yang dijalankan. Misalnya, program bantuan sosial tidak hanya dinilai dari jumlah dana yang tersalurkan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup penerima manfaat. Dalam hal ini, indikator kinerja berbasis hasil sangat diperlukan untuk mengarahkan penggunaan anggaran agar benar-benar menyentuh akar permasalahan sosial yang ada. Dengan evaluasi yang tepat sasaran, maka pemborosan anggaran dapat dicegah, dan alokasi dana publik dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat (Kurniawan & Amelia, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tentang efisiensi penggunaan anggaran publik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini difokuskan pada studi literatur dan telaah dokumen kebijakan yang relevan, seperti laporan kinerja instansi pemerintah, peraturan perundang-undangan terkait anggaran, serta publikasi ilmiah mengenai efisiensi fiskal dan kesejahteraan sosial. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah terbitan tahun 2019 ke atas, laporan kementerian dan lembaga, serta artikel akademik yang sesuai dengan fokus kajian. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan strategi pengelolaan anggaran, tantangan efisiensi fiskal, serta dampaknya terhadap indikator kesejahteraan sosial. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada kerangka teoritis pengelolaan anggaran publik dan kesejahteraan masyarakat, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam upaya perbaikan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berdampak luas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran publik pada sektor sosial telah diarahkan ke berbagai program strategis seperti bantuan sosial tunai, jaminan kesehatan nasional, subsidi pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan UMKM. Namun, efektivitas dari program-program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, ketepatan sasaran penerima, serta ketersediaan data yang akurat. Hambatan utama yang ditemukan dalam proses pelaksanaan anggaran publik antara lain adalah keterlambatan penyaluran anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana. Ketidaktepatan data penerima manfaat juga menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan rendahnya efisiensi, di mana bantuan seringkali tidak menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.

Pembahasan lebih lanjut memperlihatkan bahwa peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik memerlukan transformasi sistemik, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Strategi yang disarankan antara lain penguatan sistem data sosial nasional, penyederhanaan birokrasi penyaluran anggaran, serta digitalisasi pengawasan keuangan melalui e-monitoring. Evaluasi berbasis kinerja juga penting untuk mengalihkan fokus penganggaran dari input semata ke pencapaian hasil dan dampak sosial. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap

rupiah anggaran publik menghasilkan manfaat yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 1. Fokus Penggunaan Anggaran Publik pada Sektor Sosial

No	Program Sosial	Jenis Kegiatan Utama	Indikasi Efisiensi
1	Bantuan Sosial Tunai	Penyaluran langsung kepada rumah tangga	Tepat sasaran, namun keterlambatan
2	Jaminan Kesehatan Nasional	Pelayanan kesehatan gratis/subsidi	Meningkatkan akses layanan dasar
3	Program Keluarga Harapan (PKH)	Pendampingan dan bantuan bersyarat	Efisiensi tinggi pada daerah padat
4	Dana Desa untuk Sosial	Pembangunan posyandu, PAUD, dan BLT	Variatif tergantung perencanaan desa
5	Subsidi Pendidikan	Beasiswa dan bantuan operasional	Efektif bagi siswa miskin di kota

Penjelasan:

Tabel 1 menunjukkan berbagai program sosial yang dibiayai dari anggaran publik dan bertujuan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program seperti Bantuan Sosial Tunai dan Program Keluarga Harapan menunjukkan adanya upaya konkret pemerintah dalam menyediakan jaring pengaman sosial. Namun, efektivitas dan efisiensinya tidak merata antar daerah. Misalnya, Dana Desa cenderung lebih efektif di desa dengan kapasitas tata kelola yang baik, sementara pada desa dengan kelemahan perencanaan, pemanfaatannya kurang optimal.

Sebagian besar program pada tabel ini dinilai efisien bila melihat pada dampaknya terhadap akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, catatan kritis tetap ada pada aspek ketepatan waktu penyaluran, pendataan penerima manfaat, dan pengawasan distribusi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem manajemen anggaran yang adaptif, responsif, serta dukungan data yang akurat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik pada sektor sosial.

Tabel 2. Indikator Kesejahteraan Sosial dan Pengaruh Anggaran Publik

No	Indikator Sosial	Intervensi Anggaran	Hasil yang Diamati
1	Akses Kesehatan	JKN dan pembangunan Puskesmas	Peningkatan kunjungan layanan dasar

2	Pendidikan Dasar	BOS dan KIP	Menurunnya angka putus sekolah
3	Kesehatan Ibu & Anak	Posyandu dan program gizi	Penurunan gangguan gizi balita
4	Kemandirian Ekonomi	Pelatihan dan bantuan UMKM	Meningkatnya usaha mikro produktif
5	Ketahanan Sosial	Perlindungan sosial terpadu	Berkurangnya kerentanan kelompok rentan

Penjelasan:

Data pada tabel 2 merepresentasikan pengaruh anggaran publik terhadap peningkatan indikator kesejahteraan sosial. Anggaran pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat menunjukkan keterkaitan erat dengan pencapaian hasil sosial yang diharapkan. Misalnya, program Jaminan Kesehatan Nasional terbukti meningkatkan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di daerah terpencil. Hal yang sama terjadi pada sektor pendidikan, di mana bantuan operasional sekolah dan Kartu Indonesia Pintar mampu menjaga keberlangsungan pendidikan dasar.

Meskipun demikian, hasil yang dicapai tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga bagaimana pengelolaannya dilakukan. Efisiensi akan tercapai jika implementasi kebijakan selaras dengan kebutuhan lokal serta memiliki dukungan dari stakeholder pelaksana di daerah. Oleh karena itu, aspek koordinasi antarsektor dan perencanaan partisipatif menjadi kunci dalam mengoptimalkan dampak dari belanja sosial.

Tabel 3. Hambatan Efisiensi Anggaran Publik

No	Jenis Hambatan	Keterangan	Dampak terhadap Program Sosial
1	Data Penerima Tidak Akurat	Tidak validasi data kependudukan	Bantuan salah sasaran
2	Lambatnya Penyaluran Anggaran	Proses birokrasi terlalu panjang	Tertundanya pelaksanaan program
3	Koordinasi Antar Instansi Lemah	Tumpang tindih tugas dan kewenangan	Duplikasi atau kekosongan program
4	Kapasitas Terbatas SDM	Lemahnya perencanaan dan pelaksanaan	Program tidak efektif di lapangan

5	Kurangnya Monitoring	Minimnya evaluasi berbasis kinerja	Tidak ada perbaikan berkelanjutan
---	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Penjelasan:

Tabel 3 mengungkap berbagai hambatan yang menyebabkan rendahnya efisiensi penggunaan anggaran publik. Salah satu persoalan mendasar adalah ketidakakuratan data penerima manfaat, yang menyebabkan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Ketika data kependudukan dan sosial ekonomi tidak diperbarui secara berkala, maka program sosial cenderung salah sasaran. Hambatan berikutnya adalah lambatnya proses birokrasi dalam penyaluran anggaran, yang membuat pelaksanaan program terhambat dan tidak tepat waktu.

Selain itu, kelemahan koordinasi antar instansi pemerintah menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan sinkronisasi program antar sektor. Keterbatasan kapasitas SDM, terutama di daerah, juga menjadi penyebab rendahnya efektivitas program. Monitoring dan evaluasi yang belum maksimal membuat pemerintah kesulitan mengevaluasi efektivitas anggaran. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan digitalisasi sistem penganggaran sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien.

Tabel 4. Strategi Peningkatan Efisiensi Anggaran Publik

No	Strategi Utama	Bentuk Implementasi	Tujuan Strategis
1	Penguatan Basis Data	Integrasi data sosial nasional	Menjamin ketepatan sasaran program
2	Reformasi Birokrasi Anggaran	Penyederhanaan prosedur penyaluran	Mempercepat realisasi anggaran
3	Digitalisasi Layanan Publik	E-budgeting dan e-monitoring	Transparansi dan efisiensi pengawasan
4	Pelatihan Aparatur Daerah	Diklat perencanaan dan penganggaran	Peningkatan kapasitas pelaksana
5	Evaluasi Berbasis Kinerja	Pengukuran berdasarkan hasil, bukan input	Fokus pada outcome dan dampak sosial

Penjelasan:

Strategi yang tercantum dalam tabel 4 merupakan upaya sistematis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran publik. Penguatan basis data sosial menjadi langkah awal yang sangat penting, karena seluruh kebijakan berbasis pada data penerima

manfaat. Ketika data valid dan terintegrasi, maka program akan lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, penyederhanaan prosedur birokrasi melalui reformasi birokrasi anggaran dapat mempercepat penyaluran dana dan mencegah keterlambatan pelaksanaan program.

Penerapan digitalisasi melalui sistem e-budgeting dan e-monitoring juga merupakan inovasi penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Di sisi lain, strategi peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan teknis dan manajerial di bidang penganggaran sangat penting, terutama di daerah-daerah tertinggal. Evaluasi berbasis kinerja harus menjadi standar baru dalam sistem pengelolaan anggaran agar kebijakan benar-benar berorientasi pada hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menegaskan bahwa efisiensi dan efektivitas anggaran berbasis kinerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Dari berbagai sumber jurnal dan buku yang dikaji, terlihat bahwa praktik anggaran berbasis kinerja tidak hanya mendorong transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga berkontribusi terhadap optimalisasi pelayanan publik dan pengurangan ketimpangan sosial. Penguatan aspek partisipatif dalam penyusunan anggaran serta penerapan prinsip good governance menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan fiskal daerah. Dengan demikian, strategi pembangunan sosial yang terintegrasi dengan efisiensi anggaran dapat menjadi fondasi bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih merata dan berkeadilan.

REFERENSI

- Fadilah, L., & Utami, R. (2020). Efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145–158.
- Handayani, S., & Maulana, R. (2023). Efisiensi anggaran publik dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan sosial. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 56–70.
- Kurniawan, A., & Amelia, S. (2023). Evaluasi kebijakan bantuan sosial berbasis kinerja. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(1), 99–112.
- Nuraini, E., & Prasetyo, D. (2022). Desentralisasi fiskal dan ketimpangan pembangunan antar daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 7(3), 201–215.
- Putra, A. H., & Sari, D. N. (2020). Efisiensi penggunaan anggaran publik dalam peningkatan kualitas pelayanan sosial. *Jurnal Anggaran dan Pembangunan Nasional*, 12(1), 33–47.

- Rahmawati, I., & Lestari, Y. (2022). Efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 6(2), 89–102.
- Santoso, B., & Dewi, M. E. (2021). Peran efisiensi anggaran dalam penyediaan layanan publik. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Sosial*, 8(3), 167–180.
- Saputra, R. H., & Wahyuni, T. (2021). Good governance dan efisiensi anggaran di sektor publik. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 5(1), 71–84.
- Siregar, H. A., & Fitriani, D. (2021). Efektivitas perencanaan anggaran berbasis partisipasi publik. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 55–69.
- Yuliani, S., & Hidayat, T. (2021). Strategi peningkatan efisiensi anggaran daerah melalui pendekatan berbasis hasil. *Jurnal Reformasi Kebijakan Publik*, 6(2), 123–138.
- Yuliyanto, A. (2019). *Anggaran Berbasis Kinerja: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahro, N. (2021). *Tata Kelola Keuangan Negara dalam Perspektif Efisiensi dan Transparansi*. Jakarta: Kencana.
- Zulkarnain, H. (2020). *Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Sosial: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.